



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/02/2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional cq. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0376/M.PPN/SP/12/2015 Tanggal 23 Desember 2015 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dengan cara pemusnahan;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan nomor 002/BA-PMSH/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, telah dilaksanakan pemusnahan atas Barang Milik Negara berupa barang persediaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara berupa barang persediaan tersebut dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

- Memerhatikan : Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/SES/HK/02/2015 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Menghapuskan 675 (enam ratus tujuh puluh lima) buah/lembar/roll Barang Milik Negara berupa barang persediaan senilai Rp12.156.566,- (dua belas juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2016

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

IMRON BULKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmijan

SALINAN  
 LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
 KEPALA BAPPENAS  
 NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/02/2016  
 TANGGAL 11 FEBRUARI 2016

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN  
 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai		Kondisi	Lokasi	
						Satuan	Total			
Penghapus/Korektor										
1	1010301004	000003	Pita Penghapus IBM E-999 Putih	30 Juli 2009	3	Buah	Rp 11.000	Rp 33.000	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
2	1010301004	000004	Pita Penghapus Canon AP-14	02 Januari 2008	20	Buah	Rp 38.500	Rp 770.000	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
3	1010301004	000005	Pita Penghapus Panasonic	01 Januari 2008	4	Buah	Rp 24.200	Rp 96.800	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
Ordner dan Map										
4	1010301006	000003	Snelhechter Map Diamont	28 Oktober 2010	300	Lembar	Rp 3.025	Rp 907.500	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai		Kondisi	Lokasi	
						Satuan	Total			
<b>Pita Mesin TIK</b>										
5	1010301009	000001	Pita IBM Elektrik 999 Film	02 Januari 2008	4	Roll	Rp 71.500	Rp 286.000	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
6	1010301009	000002	Pita Mesin Canon AP-01	27 Juli 2010	4	Roll	Rp 41.470	Rp 165.880	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
7	1010301009	000005	Pita Mesin Tik Biasa	02 Januari 2008	4	Roll	Rp 27.500	Rp 110.000	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
8	1010301009	000006	Pita Mesin Tik Nakajima	02 Januari 2008	7	Roll	Rp 67.000	Rp 469.000	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
9	1010301009	000007	Pita Mesin Tik Panasonic KXR-20	02 Januari 2008	2	Roll	Rp 7.700	Rp 15.400	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
10	1010301009	000008	Pita Mesin Tik Nakajima 06448511	30 Juli 2009	1	Roll	Rp 44.000	Rp 44.000	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
<b>Berbagi Kertas</b>										
11	1010302002	000015	Kertas Strook Mesin Hitung	05 Nopember 2008	94	Lembar	Rp 1.199	Rp 112.706	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
<b>Pita Printer</b>										
12	1010304003	000001	Pita Epson Type S.015086/2180	02 Januari 2008	15	Buah	Rp 203.500	Rp 3.052.500	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
13	1010304003	000002	Pita Epson Type Lx 300	27 Juli 2010	3	Buah	Rp 60.500	Rp 181.500	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat

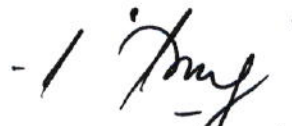
No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai		Kondisi	Lokasi		
						Satuan	Total				
Disket											
14	1010304005	000001	Disket 3,5 Inch MF-2HD	21 Oktober 2009	168	Buah	Rp 31.460	Rp 5.285.280	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat	
15	1010304005	000006	Pita Cassette C-90	02 Januari 2008	44	Buah	Rp 8.000	Rp 352.000	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat	
16	1010304005	000008	Screen Filter Komputer	02 Januari 2008	2	Buah	Rp 137.500	Rp 275.000	Rusak Berat	Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat	
Jumlah					675		Rp. 12.156.566				

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

IMRON BULKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun